

Judul : Calon Pimpinan DPR 2019-2024: Semulus Apa Jalan Puan Maharani?
Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► CALON PIMPINAN DPR 2019-2024

Semulus Apa Jalan Puan Maharani?

Bisnis, JAKARTA — Tak kalah menarik dengan Mahkamah Konstitusi, panggung politik di parlemen periode 2019—2024 bakal mencuri perhatian. Setidaknya, dalam pengisian pos pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

John Andhi Oktaveri
john.andhi@bisnis.com

Satu nama yang paling membetot perhatian adalah Puan Maharani, kader PDIP yang juga putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Nama Puan mulai disebut-sebut bakal mengisi kursi Ketua DPR. Alasannya, PDIP merupakan partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan peraih suara terbanyak pada perhelatan Pemilihan Calon Anggota Legislatif pada April lalu.

Saat berada di DPR, Puan mengatakan bahwa dirinya siap apabila diberi amanat menjadi Ketua DPR periode 2019—2024.

"Kursi Ketua DPR memang akan menjadi milik PDIP sebagai pemenang pemilu. Sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga saya bisa kemudian mendapatkan suara terbanyak nasional," ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6).

Hanya saja Puan tidak mau berspekulasi karena masih harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum PDIP Megawati

► PDIP merupakan partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan peraih suara terbanyak pada perhelatan Pemilihan Calon Anggota Legislatif pada April lalu.

Soekarnoputri.

"Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat. Baru salah satu calon yang kuat karena keputusannya akan diputuskan oleh Ibu Ketum [Megawati]," kata Puan.

Puan mengaku belum ada pembicaraan di internal partainya terkait dengan penugasan pada posisi tertentu, termasuk untuk posisi ketua DPR. Namun, dirinya sangat siap jika diposisikan sebagai Ketua DPR RI.

"Belum tahu juga masih nunggu September," katanya.

Memang Puan tidak serta merta akan menduduki posisi Ketua DPR setelah dilantik pada awal Oktober 2019.

Merujuk pada Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Artinya, apabila komposisi pemilihan pimpinan DPR terjadi seperti periode 2014 saat muncul dua paket calon pimpinan DPR, bisa terjadi perubahan angin politik. Pada 2014, paket pimpinan DPR Koalisi Indonesia Hebat kalah suara dari Koalisi Merah Putih.

Hanya saja, saat itu memang kursi

parlemen dominan oleh anggota Koalisi Merah Putih. Melihat hasil pemilu 2019, komposisi parlemen bakal kuat dikuasai oleh Koalisi Indonesia Kerja, pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa Puan adalah sosok paling berpotensi menjadi Ketua DPR RI.

Basarah mengatakan bahwa Puan berpengalaman di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Bidang PMK.

Selanjutnya, pengalaman di legislatif, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI periode 2009—2014 selain sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ke depan tidak akan terlalu banyak gejolak dalam pemilihan posisi pimpinan di parlemen.

Fahri mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintahan.

Hanya saja, dia melihat belum ada tanda-tanda DPR akan semakin kuat guna menjaga prinsip *check and balances* dalam demokrasi.

PIMPINAN MPR

Selain kursi pimpinan DPR, calon pimpinan MPR juga menjadi perhatian.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengusulkan agar posisi ketua MPR nantinya tidak dipilih secara paket, tetapi diberikan kepada

partai yang raihan suaranya kecil atau dari partai yang berada di luar koalisi parpol pemenang pemilu.

Menurutnya, disepakatinya pimpinan MPR dari partai kecil bertujuan untuk menunjukkan sikap gotong royor karena MPR menjadi simbol pemersatu bangsa.

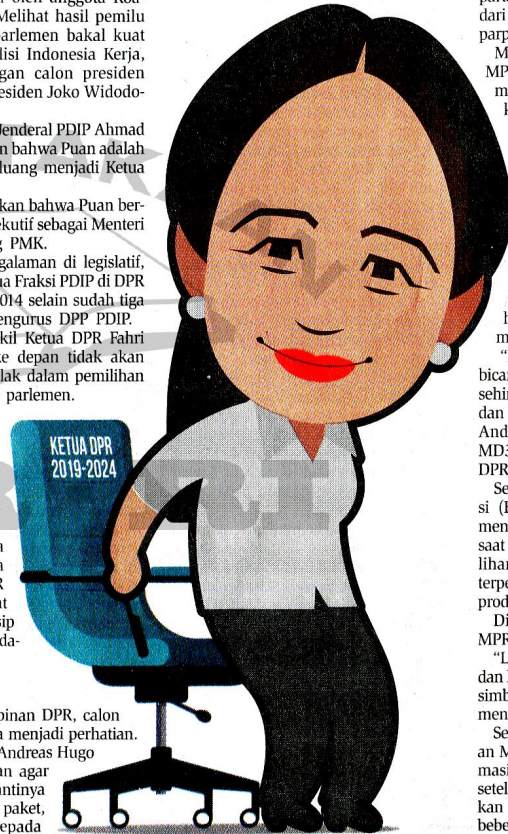
Andreas menegaskan bahwa sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemilihan pimpinan MPR justru harus menggunakan cara musyawarah dalam menentukan pemimpinnya, bukan melalui pemilihan seperti di DPR.

Apalagi, ujarnya, pimpinan MPR merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi negarawan atau mengutamakan politik kenegaraan. "Pimpin MPR itu merupakan juru bicara negara, bukan juru bicara lembaga sehingga politiknya juga politik nega dan dipilih melalui musyawarah," ujar Andreas dalam diskusi bertema "U MD3 Perlukah Dipisah?" di Gedung DPR, Selasa (25/6).

Sementara itu, Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agti menyatakan seharusnya fokus perhatian saat ini bukan pada mekanisme pemilihan pimpinan MPR, mengingat hal terpenting adalah soal kewenangan dan produktivitas lembaga itu.

Dia menilai selama ini kewenangan MPR tidak kuat sebagai lembaga negara. "Lebih baik MPR fokus pada produk dan kewenangan. Jangan MPR hanya jadi simbol tapi tak punya kewenangan untuk mengambil putusan penting," ujarnya.

Sementara itu, terkait pemilihan pimpinan MPR, Supratman mengatakan bahwa masih terbuka berbagai kemungkinan setelah hasil sengketa pilpres diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa hari ke depan. ☐



Bisma/Husin Parapat